



Judul : Kemenag Tinjau Persiapan Haji di Saudi
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 16

Kemenag Tinjau Persiapan Haji di Saudi

Hingga saat ini, masih belum ada penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan.

■ ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Meski belum ada kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 2022, Pemerintah Indonesia tetap melakukan berbagai persiapan. Tim dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) telah berada di Arab Saudi untuk meninjau berbagai persiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji.

"Ada tiga tim, yaitu tim untuk transportasi, akomodasi, dan *katering*," kata Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono, saat dihubungi *Republika*, Rabu (9/3). Tim akomodasi disebut melakukan pengecekan hotel-hotel yang siap menampung jamaah haji dari Indonesia. Tim akomodasi memastikan kondisi, fasilitas, dan izin operasional hotel yang akan menjadi tempat penginapan jamaah.

Sementara, kata Eko, tim transportasi melihat persiapan dari tiap-tiap perusahaan bus, termasuk kesiapan dari sopirnya. Menurut Eko,

tim dari Kemenag meminta agar sopir yang akan membawa bus untuk jamaah haji Indonesia adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Tim *katering*, kata Eko, akan meninjau langsung dapur-dapur perusahaan penyedia *catering*. Anggota tim berupaya memastikan sebisa mungkin perusahaan *katering* yang akan melayani kebutuhan konsumsi jamaah haji menggunakan produk dari Indonesia.

Eko menyebut, kehadiran tim dari Dirjen PHU merupakan bentuk persiapan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Namun, hingga saat ini, masih belum ada penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan, sesuai permintaan Kerajaan Saudi. "Kita belum boleh *teken* kontrak. Ini sesuai dengan permintaan Pemerintah Saudi karena ibadah haji belum resmi ada," ujar dia.

Ia juga menyebut, kontrak-kontrak yang sebelumnya sudah dilakukan dengan penyedia layanan jamaah sudah pasti tidak lagi berlaku. Dengan demikian, pengecekan perlu

dilakukan untuk membuat kontrak baru nantinya.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid menyampaikan, tim persiapan ini bertolak ke Kerajaan Saudi pada 24 Februari lalu. Mereka baru secara resmi bergerak melakukan pengecekan pada 2 Maret, setelah melakukan karantina selama lima hari.

Selepas karantina, mereka sudah melakukan pengecekan gedung hotel, bus, dan dapur yang nantinya akan digunakan.

"Mereka sudah mulai mendata hotel-hotel yang dua tahun tidak beroperasi, bagaimana *availability*-nya, berapa lama mereka menyiapkan infrastuktur, termasuk pegawaiannya. Jadi, ini sedang dipetakan, termasuk untuk dapur umum," katanya.

Keberangkatan tim tersebut merupakan bentuk mitigasi kesiapan pelaksanaan haji 2022 Pemerintah Indonesia, sembari menunggu keputusan pelaksanaan haji oleh Kerajaan Saudi.

Kebijakan umrah

Pemerintah melalui lintas kementerian dan lembaga sepakat akan menyesuaikan ketentuan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. Selasa (8/3), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar pertemuan membahas kebijakan terbaru penyelenggaraan ibadah umrah.

"Prinsipnya penyesuaian Indonesia terhadap ketentuan baru yang diberlakukan Arab Saudi untuk jamaah umrah," kata Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Haji, Indro Murwoko, saat dihubungi *Republika*, Rabu (9/3).

Sebelumnya, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana meminta calon jamaah haji harus sudah divaksin dosis lengkap. Permintaan ini setelah Arab Saudi menghapus semua protokol kesehatan yang diprediksi menjadi sinyal penyelenggaraan haji tahun 2022 digelar secara normal.

"Pelonggaran prokes tetap diikuti dengan pemantauan yang ketat. Oleh karena itu, jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi harus sudah divaksin Covid-19 dua dosis," kata Budi Sylvana.

Selain itu, Budi juga meminta jamaah tetap mengikuti kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia sebelum dan setelah berhaji. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah di Indonesia akan menyatakan Covid-19 bukan lagi pandemi. ■ ali yusuf ed: heri ruslan